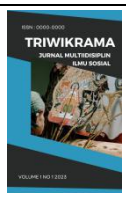
Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial
Volume 12 No 7 2026
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:



ANALISIS GAYA KEPEMIMPINAN PARTISIPATIF KEPALA DESA DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI DESA JELEGONG KECAMATAN RANCAEKEK TAHUN 2025

Resiana Febrianti[1], Desy Miranti[2]
Program Studi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Bisnis
Universitas Wanita Internasional, Bandung

ARTICLE INFO

Article history:
Received November 2026
Revised November 2026
Accepted November 2026
Available online November 2026

Email:
resianafebrianti22@gmail.com[1];
desymiranti@iwu.ac.id[2]

This is an open access article under the CC BY-SA license.
Copyright © 2026 by Author.

Abstrak

Kepemimpinan partisipatif menjadi aspek penting dalam penyelenggaraan pemerintahan desa untuk memastikan pembangunan dan program pemberdayaan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Penelitian ini bertujuan menganalisis penerapan gaya kepemimpinan partisipatif Kepala Desa Jelegong, Kecamatan Rancaekek, faktor pendukung dan penghambat, serta dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat pada tahun 2025. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan paradigma konstruktivisme. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan melibatkan Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat, dan masyarakat. Analisis data dilakukan melalui kondensasi data, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemimpinan partisipatif diterapkan melalui konsultasi, pengambilan keputusan bersama, pembagian tugas, pemberdayaan, dan berbagi informasi. Faktor pendukung meliputi keterbukaan kepala desa, sinergi antarpemangku kepentingan, dan respons masyarakat, sedangkan hambatannya mencakup keterbatasan anggaran dan kewenangan, kondisi wilayah, serta ketidakmerataan informasi. Kepemimpinan partisipatif berkontribusi terhadap perluasan akses pelayanan publik, kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan, tetapi manfaat ekonomi belum dirasakan secara merata. Dengan demikian, peningkatan kesejahteraan masyarakat memerlukan partisipasi yang inklusif, pemerataan informasi, dan kesempatan yang setara dalam mengakses program desa.

Kata kunci: kepemimpinan partisipatif, kesejahteraan masyarakat, pemerintahan desa.

Abstract

Participative leadership is an important aspect of village governance in ensuring that development and empowerment programs meet community needs. This study aims to analyze the implementation of the participative leadership style of the Village Head of Jelegong, Rancaekek District, the supporting and inhibiting factors, and its impact on community welfare in 2025. This study employs a descriptive qualitative method with a constructivist paradigm. Data were collected through interviews, observations, and documentation involving the Village Head, Village Secretary, Head of the Community Empowerment Section, and community members. Data analysis was conducted through data condensation, data display, and conclusion drawing and verification. The findings indicate that participative leadership is implemented through consultation, joint decision-making, task delegation, empowerment, and information sharing. Supporting factors include the village head's openness, synergy among stakeholders, and community responsiveness, while inhibiting factors include budget and authority constraints, territorial conditions, and unequal access to information. Participative leadership contributes to expanding access to public services, healthcare, education, and empowerment programs; however, the economic benefits have not been experienced equally by all community members. Therefore, improving community welfare requires inclusive participation, equitable access to information, and equal opportunities to access village programs.

***Keywords**: participative leadership, community welfare, village governance.*

Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial
Volume 12 No 7 2026
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:

PENDAHULUAN

Keberhasilan pembangunan desa tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan anggaran, tetapi juga oleh kemampuan Kepala Desa dalam melibatkan masyarakat dalam proses pemerintahan dan pembangunan. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 menempatkan Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan penyelenggaraan pemerintahan desa, sedangkan Permendagri Nomor 84 Tahun 2015 menegaskan fungsi Kepala Desa dalam memimpin penyelenggaraan pembangunan secara partisipatif. Oleh karena itu, kepemimpinan partisipatif penting untuk mendorong kebijakan dan program pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta mendukung peningkatan kesejahteraan, termasuk akses terhadap pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan pelayanan publik (BPS, Indikator Kesejahteraan Rakyat 2025).

Urgensi tersebut terlihat di Desa Jelegong, Kecamatan Rancaekek, Kabupaten Bandung, yang memiliki dinamika sosial ekonomi sebagai wilayah penyangga kawasan industri. Berdasarkan profil desa yang digunakan dalam penelitian, Desa Jelegong memiliki sekitar 27.504 penduduk dengan mata pencaharian yang beragam, termasuk buruh pabrik, pedagang, dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (Desa Jelegong, 2023). Observasi awal menunjukkan bahwa pemerintah desa telah menyediakan ruang partisipasi melalui musyawarah dan koordinasi dengan masyarakat. Namun, pelaksanaannya belum sepenuhnya konsisten dan merata. Keterlibatan warga dalam forum pembangunan masih menghadapi kendala, antara lain keterbatasan waktu masyarakat yang bekerja, kesenjangan partisipasi, serta belum optimalnya penyerapan aspirasi warga. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana kepemimpinan partisipatif dapat mendukung kesejahteraan masyarakat secara merata.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini menjawab tiga pertanyaan: (1) bagaimana gaya kepemimpinan partisipatif Kepala Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan di Desa Jelegong; (2) apa saja faktor pendukung dan penghambat penerapannya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat; dan (3) bagaimana dampaknya terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat? Penelitian ini bertujuan menganalisis penerapan kepemimpinan partisipatif, mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat, serta mengkaji dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat Desa Jelegong pada tahun 2025.

Penelitian terdahulu telah membahas kepemimpinan kepala desa dalam pembangunan dan kesejahteraan masyarakat, antara lain penelitian Martuni dan Siokalang (2024) mengenai gaya kepemimpinan kepala desa dalam menyejahterakan masyarakat Desa Padang Pio. Namun, kajian yang secara khusus menghubungkan penerapan kepemimpinan partisipatif, faktor pendukung dan penghambat, serta dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat Desa Jelegong masih terbatas. Penelitian ini berkontribusi pada kajian ilmu politik dan pemerintahan desa dengan mengkaji hubungan antara praktik kepemimpinan, keterlibatan masyarakat, dan akses terhadap manfaat pembangunan dalam konteks lokal.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif dan paradigma konstruktivisme. Penelitian dilaksanakan di Desa Jelegong, Kecamatan Rancaekek, Kabupaten Bandung, dengan fokus pada penerapan gaya kepemimpinan partisipatif Kepala Desa dan keterkaitannya dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat pada tahun 2025. Pendekatan ini digunakan untuk memahami praktik kepemimpinan, keterlibatan masyarakat dalam pemerintahan desa, serta faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaan program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Subjek penelitian meliputi Kepala Desa Jelegong, Sekretaris Desa, Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat, dan masyarakat Desa Jelegong. Informan dipilih berdasarkan relevansi pengetahuan dan pengalaman mereka terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa,

Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial
Volume 12 No 7 2026
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:

pelaksanaan program pemberdayaan, partisipasi masyarakat, dan kondisi kesejahteraan warga. Data dikumpulkan melalui wawancara semi-terstruktur, observasi langsung terhadap aktivitas pemerintahan dan keterlibatan masyarakat, serta dokumentasi berupa dokumen pemerintahan desa, kegiatan musyawarah, program pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat.

Analisis data dilakukan secara interaktif melalui tiga tahapan, yaitu kondensasi data, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan, dengan mengacu pada Miles, Huberman, dan Saldaña (2014). Data hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi diseleksi serta dikelompokkan berdasarkan fokus penelitian, kemudian disajikan dalam uraian naratif dan matriks untuk mengidentifikasi pola temuan. Selanjutnya, kesimpulan disusun dan diverifikasi dengan membandingkan informasi dari berbagai sumber data agar diperoleh pemahaman mengenai penerapan kepemimpinan partisipatif, faktor pendukung dan penghambat, serta dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

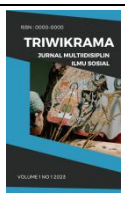
1. Penerapan Gaya Kepemimpinan Partisipatif Kepala Desa Jelegong

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kepala Desa Jelegong telah menerapkan gaya kepemimpinan partisipatif melalui konsultasi dengan masyarakat, pelibatan dalam pengambilan keputusan, pembagian tugas kepada perangkat desa, pelaksanaan program pemberdayaan, serta penyampaian informasi mengenai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Keterlibatan masyarakat dilakukan melalui forum musyawarah dan penyampaian usulan dari tingkat RT/RW, dusun, hingga desa. Dalam pelaksanaan program pemberdayaan, usulan masyarakat dibahas dan disesuaikan dengan prioritas serta kemampuan pemerintah desa.
Temuan tersebut dapat dianalisis menggunakan teori kepemimpinan partisipatif Gary Yukl (2020), yang menekankan konsultasi, pengambilan keputusan bersama, delegasi, pemberdayaan, dan berbagi informasi sebagai unsur penting dalam kepemimpinan partisipatif. Praktik di Desa Jelegong memperlihatkan bahwa kepala desa tidak sepenuhnya memusatkan proses pemerintahan pada dirinya sendiri, tetapi membuka ruang bagi perangkat desa, lembaga desa, dan masyarakat untuk terlibat dalam proses pembangunan. Hal ini juga sejalan dengan pandangan Peter G. Northouse (2022) yang menempatkan kepemimpinan sebagai proses memengaruhi pihak lain untuk mencapai tujuan bersama.

Meskipun demikian, hasil penelitian memperlihatkan bahwa keberadaan forum musyawarah belum sepenuhnya menjamin partisipasi yang merata. Sebagian masyarakat telah memperoleh informasi dan kesempatan mengikuti musyawarah, sedangkan sebagian lainnya belum memiliki akses yang sama. Masyarakat yang bekerja sebagai buruh pabrik juga menghadapi keterbatasan waktu untuk mengikuti kegiatan pemerintahan desa. Kondisi ini menunjukkan bahwa partisipasi perlu dipahami bukan hanya sebagai tersedianya ruang formal untuk menyampaikan aspirasi, melainkan juga sebagai kemampuan nyata masyarakat untuk mengakses dan memanfaatkan ruang tersebut.

Temuan ini sejalan dengan penelitian Miranti dan Lukman Arif (2022) mengenai peran kepala desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat melalui musyawarah desa, serta penelitian Rahul, Suryani, dan Sari (2025) yang menekankan keterbukaan dan komunikasi dalam kepemimpinan desa. Namun, penelitian di Desa Jelegong memberikan penekanan tambahan bahwa mekanisme partisipasi yang telah tersedia masih perlu diikuti dengan pemerataan informasi dan kesempatan keterlibatan. Dengan demikian, persoalan utama yang ditemukan bukan semata-mata ketiadaan mekanisme partisipasi, tetapi belum meratanya akses masyarakat terhadap mekanisme tersebut.

Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial
Volume 12 No 7 2026
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:



2. Faktor Pendukung dan Penghambat Kepemimpinan Partisipatif

Penerapan kepemimpinan partisipatif di Desa Jelegong didukung oleh keterbukaan kepala desa, sinergi antara pemerintah desa dan lembaga kemasyarakatan, serta respons masyarakat terhadap program pembangunan dan pemberdayaan. Keterbukaan tercermin melalui komunikasi kepala desa dengan BPD, perangkat desa, RT/RW, tokoh masyarakat, dan tokoh agama, termasuk dalam penyampaian informasi mengenai kondisi pembangunan dan perubahan anggaran. Kerja sama antarpemangku kepentingan membantu pemerintah desa mengumpulkan aspirasi dan menentukan prioritas program berdasarkan kebutuhan masyarakat.

Dalam perspektif Yukl (2020), keterbukaan komunikasi dan pertukaran informasi merupakan bagian penting dari kepemimpinan partisipatif karena memungkinkan pihak yang dipimpin memahami persoalan dan memberikan masukan. Temuan di Desa Jelegong memperlihatkan bahwa keterbukaan pemimpin dapat menjadi dasar terbentuknya hubungan kerja sama antara pemerintah desa dan masyarakat. Akan tetapi, keterbukaan pada tingkat pemimpin dan lembaga belum cukup apabila informasi yang disampaikan tidak menjangkau seluruh kelompok warga. Oleh karena itu, efektivitas kepemimpinan partisipatif juga bergantung pada kemampuan pemerintah desa membangun komunikasi yang dapat diakses oleh masyarakat dengan latar belakang dan aktivitas yang berbeda.

Di sisi lain, penelitian menemukan sejumlah hambatan, yaitu keterbatasan anggaran, luas wilayah dan besarnya jumlah masyarakat yang harus dilayani, aspirasi yang berada di luar kewenangan pemerintah desa, serta komunikasi dan informasi yang belum merata. Keterbatasan anggaran membatasi kemampuan pemerintah desa merealisasikan seluruh kebutuhan masyarakat, sedangkan persoalan yang berada di luar kewenangan desa memerlukan koordinasi dengan pemerintah pada tingkat yang lebih tinggi. Selain itu, jangkauan pelayanan yang luas menjadi tantangan dalam memastikan kebutuhan masyarakat di berbagai wilayah dapat ditangani secara memadai.

Temuan tersebut memiliki kesesuaian dengan penelitian Rahul, Suryani, dan Sari (2025) serta Novika, Garis, dan Budiawan (2023), yang menunjukkan bahwa keterbukaan dan keterlibatan masyarakat mendukung kepemimpinan desa, sementara keterbatasan sumber daya dapat menghambat pelaksanaan pembangunan. Namun, penelitian ini menunjukkan bahwa hambatan kepemimpinan partisipatif tidak hanya berkaitan dengan sumber daya dan kewenangan, tetapi juga dengan distribusi informasi. Artinya, kemampuan pemerintah desa untuk mengelola keterbatasan perlu disertai upaya menjelaskan prioritas, batas kewenangan, dan perkembangan program kepada masyarakat secara terbuka.

Berdasarkan temuan tersebut, efektivitas kepemimpinan partisipatif di Desa Jelegong dipengaruhi oleh hubungan antara kapasitas pemimpin, dukungan kelembagaan, ketersediaan sumber daya, dan pemerataan komunikasi. Kepemimpinan yang terbuka dapat memfasilitasi partisipasi, tetapi manfaatnya akan terbatas apabila sebagian warga tidak mengetahui informasi program atau tidak memiliki kesempatan untuk menyampaikan kebutuhan. Dengan demikian, tantangan penting bagi pemerintah desa adalah memastikan bahwa partisipasi tidak hanya berlangsung di antara kelompok yang sudah aktif, tetapi juga menjangkau masyarakat yang selama ini memiliki keterbatasan akses.

3. Dampak Kepemimpinan Partisipatif terhadap Kesejahteraan Masyarakat

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemimpinan partisipatif Kepala Desa Jelegong berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat melalui keterlibatan dalam pembangunan, akses terhadap pelayanan publik, kesehatan dan pendidikan, serta tersedianya program pemberdayaan. Program yang ditemukan meliputi pelatihan UMKM, digital printing, BUMDes, Koperasi Desa Merah Putih, dan kelompok tani. Program-program tersebut menunjukkan adanya

upaya pemerintah desa untuk menyediakan kesempatan bagi masyarakat dalam mengembangkan keterampilan, potensi, dan kegiatan ekonomi.

Temuan ini dianalisis menggunakan *Capability Approach* Amartya Sen (1999), yang memandang kesejahteraan bukan hanya berdasarkan pendapatan atau kepemilikan materi, tetapi juga berdasarkan kemampuan *(capability),* pencapaian nyata *(functionings),* kebebasan *(freedom),* kemampuan bertindak *(agency),* dan kesempatan *(opportunity)* yang dimiliki masyarakat. Berdasarkan pendekatan tersebut, keterlibatan masyarakat dalam pembangunan dan tersedianya program pemberdayaan merupakan bagian dari upaya memperluas kesempatan warga untuk meningkatkan kualitas hidup. Pelayanan dasar dan ruang partisipasi juga penting karena kesejahteraan berkaitan dengan kemampuan masyarakat mengakses sumber daya dan mengambil keputusan yang memengaruhi kehidupannya.

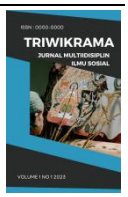
Akan tetapi, penelitian ini menemukan bahwa kesempatan yang disediakan pemerintah desa belum sepenuhnya berubah menjadi manfaat ekonomi yang nyata bagi seluruh masyarakat. Aas Setiawati menyampaikan bahwa manfaat kegiatan pemberdayaan lebih terlihat pada peningkatan kapasitas, tetapi belum sampai pada peningkatan ekonomi yang signifikan. Sementara itu, Nani menyatakan belum pernah memperoleh program pemberdayaan. Kepala desa juga mengakui bahwa program ekonomi belum maksimal dan masih menghadapi persoalan pemasaran produk UMKM. Temuan ini menunjukkan adanya perbedaan antara tersedianya program dan kemampuan masyarakat untuk mengakses serta memperoleh manfaat dari program tersebut.

Dalam kerangka Sen (1999), kondisi tersebut dapat dipahami sebagai kesenjangan antara kesempatan yang tersedia dan pencapaian nyata yang berhasil diperoleh masyarakat. Pelatihan atau program pemberdayaan dapat memperluas kemampuan warga, tetapi dampak ekonominya membutuhkan dukungan lanjutan, seperti akses pasar, pendampingan usaha, dan kesempatan berpartisipasi yang lebih merata. Oleh karena itu, keberhasilan program tidak cukup dinilai dari pelaksanaannya, tetapi juga perlu dilihat dari sejauh mana masyarakat dapat memanfaatkan hasil kegiatan untuk meningkatkan kualitas hidupnya.

Temuan ini sejalan dengan penelitian Martuni dan Siokalang (2024), yang menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat melalui musyawarah, gotong royong, dan pengambilan keputusan pembangunan dapat mendukung kesejahteraan masyarakat desa. Namun, hasil penelitian di Desa Jelegong memberikan penekanan bahwa hubungan antara kepemimpinan partisipatif dan kesejahteraan tidak berlangsung secara otomatis. Partisipasi dapat membantu pemerintah mengidentifikasi kebutuhan dan menentukan prioritas program, tetapi dampak akhirnya dipengaruhi pula oleh pemerataan akses, ketersediaan sumber daya, dan kemampuan masyarakat memanfaatkan kesempatan yang diberikan.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kepemimpinan partisipatif Kepala Desa Jelegong telah membuka ruang keterlibatan masyarakat dan berkontribusi terhadap perluasan akses pelayanan serta kesempatan pemberdayaan. Meskipun demikian, penerapannya belum sepenuhnya optimal karena akses informasi dan partisipasi masih belum merata, sementara manfaat ekonomi program pemberdayaan belum dirasakan oleh semua warga. Kontribusi akademik penelitian ini terletak pada penjelasan bahwa keberhasilan kepemimpinan partisipatif dalam konteks pemerintahan desa tidak cukup diukur dari keberadaan musyawarah, keterbukaan pemimpin, atau jumlah program yang dilaksanakan. Keberhasilan tersebut juga perlu dinilai berdasarkan pemerataan kesempatan masyarakat untuk terlibat dan kemampuan mereka mengubah kesempatan yang tersedia menjadi peningkatan kesejahteraan yang nyata. Dengan demikian, kepemimpinan partisipatif menjadi lebih bermakna ketika proses pengambilan keputusan yang terbuka disertai akses informasi yang inklusif dan program pemberdayaan yang memberikan manfaat berkelanjutan bagi masyarakat.

Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial
Volume 12 No 7 2026
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:



KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa gaya kepemimpinan partisipatif Kepala Desa Jelegong telah diterapkan melalui konsultasi, pelibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan, pembagian tugas, pemberdayaan, dan berbagi informasi, meskipun pelaksanaannya belum optimal. Keterbukaan kepala desa, sinergi antarlembaga, dan partisipasi masyarakat menjadi faktor pendukung, sedangkan keterbatasan anggaran, jangkauan pelayanan, kewenangan, serta pemerataan informasi menjadi hambatan. Kepemimpinan partisipatif berkontribusi terhadap perluasan akses pelayanan publik dan kesempatan pemberdayaan, tetapi manfaat ekonomi belum dirasakan secara merata. Secara teoretis, temuan ini memperkuat relevansi teori kepemimpinan partisipatif Yukl (2020) dan *Capability Approach* Sen (1999), bahwa kesejahteraan tidak hanya berkaitan dengan pendapatan, tetapi juga kemampuan, akses, dan kesempatan masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidup. Secara praktis, pemerintah desa perlu memperluas pemerataan informasi dan akses terhadap program agar manfaat pembangunan dapat dirasakan lebih inklusif.

Penelitian ini berfokus pada kepemimpinan partisipatif dan kesejahteraan masyarakat di Desa Jelegong pada tahun 2025, sehingga temuannya menggambarkan konteks lokal tersebut dan tidak dapat langsung digeneralisasikan ke desa lain. Penelitian ini juga belum menunjukkan secara merata sejauh mana program pemberdayaan menghasilkan peningkatan ekonomi nyata bagi seluruh warga. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya dapat mengkaji penerapan kepemimpinan partisipatif di desa lain serta menelusuri lebih mendalam hubungan antara akses masyarakat terhadap program pemberdayaan dan perubahan kesejahteraan yang dihasilkan.

DAFTAR PUSTAKA

Badan Pusat Statistik. (2025). Indikator kesejahteraan rakyat 2025

Desa Jelegong. (2023). Profil Desa Jelegong.

Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2015). Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa.

Martuni, K., & Siokalang, M. A. (2024). Analisis gaya kepemimpinan kepala desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Padang Pio. *UMMagelang Conference*.

Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook. SAGE Publications.*

Miranti, M., & Arif, L. (2022). Peran kepala desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat pada pembangunan di Desa Warukin Kecamatan Tanta Kabupaten Tabalong. Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi, 22(2), 932–937.

Northouse, P. G. (2022). *Leadership: Theory and practice. SAGE Publications*.

Novika, D., & Budiawan, A. (2023). Gaya kepemimpinan kepala desa dalam meningkatkan pembangunan di Desa Mangkubumi Kecamatan Sadananya Kabupaten Ciamis. *Journal Education and Government Wiyata,* 1(3), 129–142.

Rahul, I., & Sari, T. M. (2025). Analisis gaya kepemimpinan kepala desa dalam memajukan desa (Studi Desa Bumi Agung Marga Kecamatan Abung Timur Kabupaten Lampung Utara Tahun 2024). Arus Jurnal Sosial dan Humaniora, 5(3), 3596–3604.

Republik Indonesia. (2024). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Sen, A. (1999). *Development as freedom Oxford University Press.*

Yukl, G. A., & Gardner, W. L. (2020). *Leadership in organizations (9th ed.). Pearson.*